



ANALISIS PENCULIKAN ANAK DALAM INVASI RUSIA KE UKRAINA PADA TAHUN 2022 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Christopher David Nagaria

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Abstrak

Penculikan anak berupa tindakan yang sangat serius terhadap pelanggaran norma-norma hukum internasional. Hukum Internasional sendiri merupakan kumpulan prinsip-prinsip aturan dasar yang wajib diatuhi oleh negara-negara dalam hubungan antarnegara. Walaupun itu, berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Rights Watch (HRW), telah mendokumentasi dan melaporkan tindakan deportasi maupun penculikan anak oleh Rusia sejak permulaan invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Permasalahan yang diketemukan oleh penulis merupakan apa saja dasar hukum internasional terhadap penculikan anak serta bagaimana implementasi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian berupa hukum yuridis normatif untuk menganalisis hukum positif terhadap deportasi anak menurut hukum internasional. Bahwa dalam kajian penulis terdapat berbagai peraturan dan konvensi yang bersifat preventatif dan represif. Konvensi Geneva I mengatur tindakan deportasi dapat diakui sebagai genosida Konvensi Geneva IV mengatur hak dan kewajiban organisasi humaniter dalam keadaan perang. Konvensi PBB 1989 mengatur hak-hak anak. Sementara, Statuta Roma mengatur hak dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menggugat dan memutus hukuman ke pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Deportasi Anak, Penculikan Anak, Invasi Rusia ke Ukraina.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin, selaku Presiden Rusia, mengumumkan "operasi militer khusus," dimana menandai permulaan invasi penuh skala ke Donetsk dan Luhansk, suatu wilayah timur di Ukraina.

Pengumuman ini segera diikuti oleh serangan rudal Rusia ke target-target Ukraina, disertai dengan infiltrasi pasukan Rusia dari semua sisi perbatasan Rusia-Ukraina. Konflik bersenjata yang dihasilkan telah mengakibatkan kehilangan ribuan

nyawa, melibatkan personel militer maupun warga sipil yang tak bersalah. Pasca peristiwa ini, banyak media telah meliput secara mendalam perkembangan perang ini, sementara para korban telah beralih ke media sosial untuk berbagi video dan laporan tertulis, merinci tindakan tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional yang dilakukan oleh Rusia terhadap rakyat Ukraina.

Invasi ini mengakibatkan krisis kemanusiaan yang mengguncangkan, dengan jutaan orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan ribuan prajurit serta warga sipil kehilangan nyawa. Salah satu konsekuensi yang tidak manusiawi dan mencabik hukum dari perang ini adalah pengusiran anak-anak Ukraina.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 2 juta anak-anak telah dipaksa melarikan diri dari rumah mereka di Ukraina sejak invasi dimulai. Banyak dari anak-anak ini telah terpisah dari orang tua atau keluarga mereka, dan beberapa di antaranya mereka dilaporkan telah mengalami deportasi ke Rusia.

PBB telah mengutuk deportasi anak-anak oleh Rusia, menyebutnya sebagai "kejahatan perang". PBB telah mendesak agar anak-anak yang terusir kembali dilepaskan dan dikembalikan kepada keluarga mereka sesegera mungkin.

Hukum internasional juga melindungi anak-anak dari deportasi. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) menyatakan bahwa "tidak ada anak yang boleh tunduk pada campur tangan keluarganya yang sewenang-wenang atau melanggar hukum," dan bahwa "Negara Pihak harus menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang melanggar hukum."

Deportasi anak-anak oleh Rusia merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas. Hal tersebut dapat merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Organisasi internasional dan negara anggota PBB telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah dideportasi agar dilepaskan dan dikembalikan kepada keluarga mereka sesegera mungkin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa metode yuridis normative. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi undang-undang, buku-buku, tinjauan pustaka, dan sumber media online yang relevan. Tujuannya untuk mencari dan menganalisis tindakan deportasi maupun penculikan anak menurut hukum internasional. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memeriksa dan menginterpretasikan aspek hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti, serta memberikan pemahaman tentang hukum internasional pada penculikan anak dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum Internasional

Pasal 2 Konvensi Geneva 1948 tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Geneva I) mengartikan genosida sebagai salah satu dari lima tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Tindakan-tindakan ini meliputi

pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok, dengan sengaja memberlakukan kondisi kehidupan pada kelompok yang dihitung akan menyebabkan penghancuran fisik dan bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan yang paling mencolok adalah pemindahan paksa anak-anak kelompok ke kelompok lain. Pemerintah Rusia telah membantah bahwa mereka secara paksa mendepor anak-anak Ukraina. Namun, PBB dan Organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan pelaporan dan kasus anak-anak Ukraina yang diambil dari rumah dan keluarga mereka serta diangkut ke Rusia. Sekitar 200,000 anak-anak ini telah dipisahkan dari orang tua dan saudara-saudara mereka dan ditahan di panti asuhan dalam wilayah Rusia. Pengusiran paksa anak-anak ini berupa tindakan penculikan menurut *Human Rights Watch (HRW)* dan adalah upaya jelas untuk menghancurkan bangsa Ukraina melalui penghapusan identitas anak-anak Ukraina.

Dalam Konvensi Geneva IV tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang pasal 4 protokol II menyatakan bahwa “orang-orang yang tidak atau telah berhenti mengambil bagian aktif dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan mereka yang tidak mampu bertempur akibat sakit, luka, tahanan, atau alasan lainnya, dalam segala keadaan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran atau kewarganegaraan, atau alasan serupa lainnya”.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa anak-anak, sebagai warga sipil, harus dilindungi dari bahaya dan harus diperlakukan secara manusiawi. Mereka tidak boleh secara paksa dideportasi atau dipisahkan dari keluarga mereka.

Selanjutnya, pasal 49 dan 79 Protokol I melarangkan deportasi atau transfer orang yang dilindungi oleh negaranya ke negara lain yang sedang berkonflik. Maka anak-anak Ukraina tidak dapat secara paksa dideportasi ke Rusia kecuali pengusiran paksa anak-anak Ukraina dapat dijustifikasi oleh alasan keamanan dan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa saat pertemuan pers melaporkan bahwa Rusia dan Ukraine tidak memiliki hubungan komunikasi internal maupun public terhadap deportasi anak-anak Ukraina. Bahkan, mereka dipaksa secara sistematis dipisahkan dengan keluarga oleh pasukan Rusia di daerah timur dan selatan Ukraina.

2. Kebijakan Organisasi Bantuan Kemanusiaan

Dalam Konvensi Geneva IV pasal 17 dan 24 Protokol I memberikan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan organisasi bantuan kemanusiaan hak khusus untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata. Bahwa ICRC dan organisasi kemanusiaan lainnya memiliki hak dan kewajiban untuk mengakses anak-anak Ukraina dan memberikan bantuan kepada mereka serta menyatukan mereka keluarga mereka dimana memungkinkan.

Pada 16 maret 2022, Dewan HAM PBB mengutuk tindakan pemerintah Rusia dan menuntut agar segera melepaskan semua anak Ukraina yang diculik dengan ancaman sanksi terhadap pemerintah Rusia dan para pemimpinnya. Badan Pelacak dan Perlindungan Sentral ICRC telah bergerak untuk menyampaikan berita keluarga dan membantu reunifikasi keluarga dengan anak-anak yang telah dipisahkan.

3. Hak dan Perlindungan Anak

Peraturan terhadap hak dan perlindungan anak diatur dalam Konvensi PBB 1989 tentang Hak-Hak Anak (UNCRC). Pasal 1 mendefinisikan seorang anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, ataupun telah ditentukan oleh hukum negara masing-masing. Pasal 9 menyatakan bahwa seorang anak memiliki hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya dengan pengecualian hal itu dalam kepentingan terbaik anak dan dilakukan melalui prosedur peradilan. Atas kepentingan anak, pasal 7 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas nama, memiliki kewarganegaraan, dan berhak tahu dan dirawat oleh orang tuanya. Menurut ombudsman Ukraina untuk hak-hak anak, Rusia melakukan penculikan dengan tujuan menambah jumlah penduduknya, dan bahwa Rusia sedang melakukan pemeriksaan dan re-edukasi anak-anak Ukraina dengan tujuan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam negara Rusia sebagai warga negara permanen. Acuan tersebut telah dibukti dimana pada tanggal Mei 2022, Vladimir Putin menandatangani dekrit yang memfasilitasi pemberian kewarganegaraan Rusia kepada anak-anak Ukraina untuk memungkinkan adopsi secara permanen oleh keluarga Rusia.

Pasal 19 memerintahkan bahwa negara harus mengambil Langkah legislative, administrative, social, dan Pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan:

- a. fisik atau mental
- b. cedera
- c. penyalahgunaan
- d. pengabaian
- e. perlakuan buruk
- f. ataupun eksploitasi.

Sebaliknya, pasal 27 dan 30 mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk menikmati kebudayaan dan standar hidup yang memungkinkan

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

Tetapi menurut kesaksian saksi yang diperoleh oleh Komisi Penyelidikan PBB mengenai Ukraina, Sebagian anak-anak tersebut mengalami kondisi kehidupan buruk, perawatan yang tidak memadai, dan penghinaan verbal saat tinggal di bawah pengawasan negara Rusia. Beberapa anak yang Kembali memberi kesaksian bahwa mereka menerima hukuman yang keras dan kondisi hidup yang terbas saat berada di Rusia. Pemerintah Ukraina telah mengklaim bahwa beberapa anak telah mengalami eksploitasi seksual dan fisik, perundungan oleh teman sebaya, dan tekanan untuk menyanyikan lagi kebangsaan Rusia.

Anak-anak Ukraina telah diculik oleh negara Rusia setelah orang tua mereka ditangkap atau tewas selama invasi Rusia, dan/atau setelah mereka terpisah dari orangtua mereka di zona perang yang aktif. *HRW* melaporkan bahwa anak-anak Ukraina yang diculik ditempatkan di suatu "*summer camp*" di wilayah Rusia. Anak-anak yang diculik telah dialami proses perusiaan, yaitu bentuk asimilasi budaya orang non-Rusia yang dengan sukarela ataupun terpaksa untuk melepaskan budaya dan Bahasa mereka saat itu dimana melanggarkan hak anak dan mengonstitusi tindakan genosida.

Pemerintah Ukraina telah memverifikasi identitas lebih dari 19.000 anak yang diculik melalui situs "*Children of War*". Selain ICRC, organisasi internasional seperti *Save Ukraine* merupakan organisasi khusus yang berupaya dalam fasilitasi dan repatriasi untuk reunifikasi keluarga anak-anak Ukraina yang diculik.

4. Tindakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Dalam Statuta Roma pasal 8(2)(a)(vii) menjelaskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi dalam hal kejahatan

perang, khususnya ketika dilakukan sebagai bagian dari rencana maupun sebagian dari pelaksanaan kejahatan semacam itu dalam skala besar, termasuk pengusiran atau pemindahan yang melanggar hukum, atau pembatasan kebebasan yang melanggar hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Pasal 8(2)(b)(viii) juga menyatakan bahwa kejahatan perang juga mencakup pengambilan tawanan.

Walaupun Rusia tidak meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, Ukraina telah terima dan bekerjasama dengan ICC atas penyelidikan atas kejahatan perang oleh Rusia. Pada 17 Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisioner Rusia untuk Hak Anak Maria Lvova-Belova, dengan tuduhan bertanggung jawab atas kejahatan perang terkait deportasi dan pemindahan anak-anak selama invasi Rusia ke Ukraina.

SIMPULAN

Peristiwa yang terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah membawa ke permukaan kurangnya perhatian yang mengganggu terhadap hukum internasional, hak asasi manusia, dan kesejahteraan anak-anak, transfer paksa, asimilasi sistematis, dan perlakuan tidak pantas terhadap anak-anak Ukraina oleh pasukan Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap konvensi dan prinsip hukum internasional yang telah mapan untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah di masa konflik. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova merupakan Langkah yang signifikan menuju pertanggungjawaban, yang menunjukkan tekad global untuk mengadili bahkan mimpin tinggi atas tindakan mereka. Tindakan tersebut

menegaskan pentingnya kerangka hukum internasional secara efektif untuk mengatasi dan mengutuk tindakan jahat. Selanjutnya babak tragis dalam sejarah ini menjadi pengingat keras terhadap kepentingannya untuk menjaga hak-hak anak, melestarikan identitas budaya, dan melindungi warga sipil selama masa konflik.

DAFTAR PUSTAKA

McConville, M. & Chui W, H. (2017). *Research Methods of Law*. Edinburgh: University Press

Cavandoli, S. & Wilson, G. (2022). Distorting fundamental norms of International Law to Resurrect the Soviet Union: The International Law Context of Russia's Invasion of Ukraine. 69: 383-140

Amann D, M. (2022). *International Child law and the Settlement of Ukraine-Russia and Other Conflicts*. Social Science Research Network. 99(12): 560-595.

Diamond, Y. et al. (2022), An Independent Legal Analysis of the Russian Federation's Breaches of the Genocide Convention in Ukraine and the Duty to Prevent, Legal Report. New Lines Institute & Raoul Wallenberg Centre Ottawa.

UNHRC. (2023), Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, report. A/HRC/52/62

ICC-01. (2022). *Situation in Ukraine*. Diunduh di <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>. tanggal 28 Agustus 2023

ICC Press. (2023). Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Diunduh di <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and-tanggal-27-Agustus-2023>

UN Press. (2023) Deportation, Treatment of Ukraine's Children by Russian Federations Takes Centre Stage by Many Delegates at Security Council Briefing. Diunduh di

<https://press.un.org/en/2023/sc15395.doc.htm>
tanggal 27 Agustus 2023

Kunytski, O. (2023), Ukraine's abducted children: 'list of suspects will grow'. Diunduh di <https://www.dw.com/en/ukraines-abducted-children-the-list-of-suspects-will-grow-longer/a-65117416> tanggal 28 Agustus 2023.

Lederer E, M. (2023), Red Cross confirms contact with Russia about Ukrainian kids. Diunduh di <https://apnews.com/article/russia-ukraine-children-reunification-red-cross-4de3c9635d1fd330167e55720f90c12d> tanggal 27 Agustus 2023.

PACE. (2023), The forcible transfer and 'russification' of Ukrainian children shows evidence of genocide, says Parliamentary Assembly of Europe. Diunduh di <https://pace.coe.int/en/news/9075/the-forcible-transfer-and-russification-of-ukrainian-children-shows-evidence-of-genocide-says-pace> tanggal 29 Agustus 2023.